



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABDOLLAH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 498201

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.537.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1250 m2/250 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 1.367.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/98 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
6. Tanah Seluas 598 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1200 m2/216 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 590.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **885.423.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.200.000
2. MOTOR, YAMAHA X TRAUD Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.400.000



3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MAGH10R-BRXMBD 2.0 V HV CVT / MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 598.823.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.178.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.027.634.940

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 13.628.057.940

III. HUTANG Rp. 1.594.200.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 12.033.857.940

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.